



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOOR HADI
2. Jabatan : KEPALA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
3. NHK : 209032

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 146.020.000

1. Tanah Seluas 2776 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 27.760.000
2. Tanah Seluas 1716 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 17.160.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/100 m2 di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 101.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 310.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 40.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 496.020.000

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 496.020.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.